

**PEMBAGIAN UPAH PERTANIAN DENGAN SISTEM MAJEK  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi di Desa Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi**

**Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1**

**Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh:**

**EVA DARA PUSPITASARI**

**NPM : 1621030346**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

**PEMBAGIAN UPAH PERTANIAN DENGAN SISTEM MAJEK  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi di Desa Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh:**

**EVA DARA PUSPITASARI**

**NPM : 1621030346**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.**

**Pembimbing II : Juhratul Khulwah, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

## ABSTRAK

Pertanian di Desa Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah terdapat pembagian upah dengan sistem *majek* yaitu merupakan kerjasama antara pemilik sawah dan buruh tani. Kegiatan tersebut adalah kegiatan upah mengupah (*Ijarah*) kepada buruh tani, dimana buruh tani yang diberi tanggung jawab untuk menanam padi dan memanen padi akan di bayar saat panen pembagian hasil padi dengan sistem *majek* belum ada kejelasan upah terhadap buruh tani, bahkan tidak mendapatkan upah jika gagal panen. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana praktik pembagian upah pertanian dengan sistem *majek* di Desa Srikaton, Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pembagian upah pertanian dengan sistem *majek* pada petani di Desa Srikaton, Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pembagian upah pertanian dengan sistem *majek* di Desa Srikaton, Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan tinjauan hukum Islam tentang praktik pembagian upah pertanian dengan sistem *majek* pada petani di Desa Srikaton, Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*), sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis ialah pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, pengolahan data dilakukan melalui *editing* dan sistemasi data, analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode *deduktif*. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik pembagian upah pertanian dengan Sistem *Majek* di Desa Srikaton, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah terjadi karena kesepakatan kedua belah pihak, kegagalan panen padi maka kerugian akan di tanggung bersama, gagal panen sering terjadi di musim sadon, gagal panen di sebabkan karena kekeringan, karna pesawahan miliknya jauh dari sungai atau berada di dataran yang tinggi, tidak bisa menyedot air untuk padi yang ia tanami. Sedangkan menurut hukum Islam, praktik pembagian upah pertanian dengan Sistem *Majek* sah atau diperbolehkan dalam hukum Islam, karena rukun dan syarat *Ujrah* sudah terpenuhi, yaitu adanya *Aqid*, *Sighat* dan *Ujrah*. Maka kegagalan yang dialami petani mengakibatkan kerugian kedua belah pihak, sudah menjadi kesepakatan bersama di awal akad apabila keduanya setuju dengan perjanjian tersebut, maka keduanya akan mengetahui hak dan kewajiban kedua belah pihak.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EVA DARA PUSPITASARI  
NPM : 1621030346  
Jurusan/Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pembagian Upah Pertanian dengan Sistem *Majek* dalam Tinjauan Hukum Islam” (Studi di Desa Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)” adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *foodnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar di maklumi.

Bandar Lampung, Januari 2021  
Penulis.



**Eva Dara Puspitasari**  
Npm : 162030346





KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARI'AH

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

### PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudari:

**Nama Mahasiswa : Eva Dara Puspitasari**

**NPM : 1621030346**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul Skripsi : Pembagian Upah Pertanian dengan Sistem Majek dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)**

### MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam siding Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197111061998032005**

Pembimbing II

**Juhratul Khulwah, M.S.I.**  
**NIP. 199107092018018012002**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**





## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۚ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

(QS Al- Maidah ayat 1)



## PERSEMBAHAN

Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada Ayahanda tercinta, Bapak Nurdin dan Ibu tercinta Sakinem, yang selalu mendoakan saya, memberi semangat, motivasi, terimakasih perjuangan kalian tanpa henti untuk memberikan segala kasih sayang kalian.
2. Kakakku Dini Oktaviani Saputri yang selalu memberikan semangat kepada saya.
3. Adikku Marsel, Satria, Arya, Khanza yang selalu mendoakan ku dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Sahabatku M. Kadafi Aziz yang selalu membantu ku dan menyemangati ku dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Eva Dara Puspitasari di lahirkan di Srikaton, pada tanggal 28 Agustus 1997. Anak kedua dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Nurdin dan Ibu Sakinem. Penulis mulai menempuh pendidikan formal dimulai:

1. SDN 01 Srikaton pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009.
2. Mts Bustanul Ulum Jayasakti pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012.
3. SMA Muhammadiyah 01 Kalirejo pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015.
4. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah(Muamalah).

Bandar Lampung, 01 Januari 2021  
Penulis,

**Eva Dara Puspitasari**  
Npm: 1621030346

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr wb*

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang penuh dengan kekhilafan dalam bertindak dan berfikir. Sholawat dan salam diutarakan kepada Nabi Muhammad SAW beserta dengan keluarga dan para sahabatnya. Semoga di hari akhir kelak kita semua sebagai umatnya mendapatkan siraman syafa'atnya di yaumul akhir kelak. Terucap rasa syukur yang teramat karena penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul “Pembagian Upah Pertanian dengan Sistem *Majek* dalam Tinjauan Hukum Islam” (Studi : Desa Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah) dengan lancar tanpa memiliki kesulitan yang berarti.

Dalam penulisan skripsi ini disadari begitu banyak pertolongan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Sebab tanpa adanya pertolongan tersebut tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden IntanLampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden IntanLampung.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I, selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. H. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta agama kepada saya selama menempuh perkuliahan di kampus.
6. Sahabat seperjuanganku Jurusan Muamalah angkatan 2016 kelas G yang telah memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas canda, tawa, tangis, duka, bahagia, dukungan dan kebersamaan yang kita lewati selamaini.
7. Sahabat-sahabatku, Amelia Eraswati, Windy Alifia, Dian Yunita, Annissa Fauzia, Priski Kurniasari, Rimba Kurnia Sari, yang selalu ada, yang selalu berjuang bersama-sama dan yang selalu memberikan semangat yang luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini.



Semoga semua amal dan kebbaikannya akan mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT. Untuk itu kritik dan saran yang dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin yarobbal'amin.

*Wassalamu'alaikum wr wb*

Bandar Lampung, Januari 2021  
Penulis



**Eva Dara Puspitasari**  
Npm : 1621030346

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	6
E. Rumusan Masalah .....	6
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Signifikasi penelitian .....	7
H. Metode penelitian.....	8

### BAB II : LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori .....	
1. Akad .....	15
a. Pengertian Akad .....	15
b. Rukun dan Syarat Akad .....	17
c. Macam-macam Akad .....	19
d. Prinsip-prinsip Akad .....	23
e. Sah dan Batalnya Akad .....	26
f. Berakhirnya Akad .....	32
g. Hikmah-Hikmah Akad .....	
2. <i>Ijarah</i> .....	35
a. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	
b. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	
c. Rukun Dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	
d. Macam-macam <i>Ijarah</i> .....	
e. Pembatalan <i>Ijarah</i> .....	
3. Upah .....	
a. Pengertian Upah .....	
b. Rukun dan Syarat Upah .....	
c. Macam-Macam Upah .....	

- d. Waktu Pembayaran Upah
- e. Bentuk Upah
- f. Prinsip-Prinsip Upah
- g. Gugurnya Upah
- h. Hikmah Upah
- 4. Sistem Majek
  - a. Pengertian Sistem *Majek*
  - b. Hak dan Kewajiban Sistem *Majek*
- B. Tinjauan Pustaka

### **BAB III : LAPORAN HASIL PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Tentang Desa Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah
  - 1. Sejarah Singkat Desa Srikaton
  - 2. Visi dan Misi Desa Srikaton
  - 3. Kondisi Geografis Desa Srikaton .....
- B. Pelaksanaan Praktik Pembagian Upah dengan Sistem *Majek*
  - 1. Pelaksanaan Sistem Majek pada Masyarakat Desa Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah
  - 2. Pembagian Upah dengan Sistem *Majek* di Desa Srikaton

### **BAB IV : ANALISIS PENELITIAN**

- A. Praktik Pembagian Upah Pertanian dengan Sistem *Majek* di Desa Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ..
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembagian Upah Pertanian dengan Sistem *Majek*.....

### **BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. rekomendasi

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam memahami judul skripsi ini serta mencegah adanya kesalahan dalam memahami maksud dari kata-kata yang tercantum dalam judul ini maka secara singkat terlebih dahulu akan di uraikan beberapa kata yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan di bahas **“Pembagian Upah Pertanian dengan Sistem *Majek* dalam Tinjauan Hukum Islam” (Studi di Desa Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)**

Adapun Istilah yang akan di bahas ialah:

Upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>1</sup>

Sistem *Majek* adalah istilah orang jawa yang berasal dari kata “ajeg” yang artinya pungutan pada waktu tertentu, sistem *majek* di gunakan dalam pertanian yang berarti buruh tani diberi tanggung jawab untuk menanam dan memanen.<sup>2</sup>

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan meninjau pandangan atau suatu pendapat yang sudah di selidiki dan di pelajari.

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), h. 115.

<sup>2</sup> Prawanti, Wawancara dengan Penulis, di Srikaton, 2 November 2019

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asa, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.<sup>3</sup>

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun beberapa faktor yang di jadikan sebagai alasan memilih judul skripsi “Pembagian Upah Pertanian dengan Sistem *Majek* dalam Tinjauan Hukum Islam” (Studi di Desa Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah) yaitu sebagai berikut:

### 1. Alasan Objektif

Bahwa judul penelitian ini belum banyak yang meneliti tentang Pembagian Upah Pertanian dengan Sistem *Majek*.

### 2. Alasan Subjektif

Bahwa judul penelitian ini sesuai dengan ruang lingkup keilmuan yang pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta di dukung oleh tersedianya literatur dan data-data yang di butuhkan dalam penyusunan skripsi.

## C. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi adalah suatu aspek dalam kehidupan bermasyarakat, disamping aspek sosial, hukum politik, budaya dan lainnya.<sup>4</sup> Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Adapun makhluk sosial, yang

<sup>3</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17.

<sup>4</sup> Abdullah Siddik, *Inti Dasar Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 2.

artinya manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain yang kemudian disebut dengan hidup bermasyarakat.<sup>5</sup> Muamalah (perhubungan antara sesama manusia) merupakan bagian dari syariat yang wajib di pelajari bagi setiap muslim. Muamalat merupakan perhubungan antara sesama manusia yang hasilnya akan kembali kepada diri sendiri dan masyarakat tempat dia berada.<sup>6</sup>

Kerjasama dalam pertanian di bagi menjadi tiga yaitu *Muzara'ah*, *Mukhabarah* dan *Musaqah*. *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan, jadi *muzara'ah* adalah akad penggarapan tanah kosong produktif dengan sistem bagi hasil yang di sepakati bersama, yang benih tanamannya di tanggung oleh pemilik tanah, sebaliknya jika benih tanamannya di tanggung oleh penggarap maka di sebut *mukhabarah*. Sedangkan *musaqah* adalah kerjasama perawatan tanaman, seperti menyirami dan sebagainya dengan perjanjian bagi hasil atas buah atau manfaat yang di hasilkan.<sup>7</sup>

Namun, pertanian di Desa Sriaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah terdapat pembagian upah dengan sistem *majek*. Yaitu kerjasama antara pemilik sawah dan buruh tani. Pemilik sawah memberikan tanggung jawab kepada buruh tani untuk menanam dan memanen padi, dengan upah pada saat panen dan apabila gagal panen buruh tani tidak mendapatkan hasilnya. Kegiatan tersebut adalah kegiatan upah mengupah

---

<sup>5</sup> Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Cetrul Media, 1992), h. 74.

<sup>6</sup> Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassar Fi Al-muamalat*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), h. 21.

<sup>7</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 199.



(*Ijarah*) kepada buruh tani, dimana buruh tani yang diberi tanggung jawab untuk menanam padi dan memanen padi akan di bayar saat panen. Pemberian hasil panen yaitu 5:1, upah menanam dan memanen padi tersebut belum jelas karena apabila mendapatkan hasil panen yang berlimpah maka buruh tani akan mendapatkan hasil yang banyak, apabila hasil panen sedikit maka buruh tani mendapatkan hasil sedikit dan apabila gagal panen maka si buruh tani tidak mendapatkan hasil padi sama sekali.

Upah mengupah dalam Islam termasuk dalam kategori bab *al-ijarah* yaitu memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah di perintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu di berikan menurut perjanjian yang telah di sepakati.<sup>8</sup>

Upah mengupah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong karena tujuan di syariatkan *Ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seorang mempunyai uang tetapi tidak bekerja, dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *Ijarah* keduanya dapat saling menguntungkan dan dapat saling memperoleh manfaat.<sup>9</sup>

Dengan demikian apa yang terjadi pada pembagian upah dengan sistem *majek* belum ada kejelasan upah terhadap buruh tani, bahkan tidak mendapatkan upah jika gagal panen.

Berdasarkan latar belakang di atas, yaitu adanya pembagian upah pertanian dengan sistem *majek* di Desa Srikaton, Kecamatan Anak Tuha

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 183.

<sup>9</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 217.

Kabupaten Lampung Tengah tersebut maka terdapat indikasi ketidaksesuaian antara teori dan praktik, yang mana persoalan seperti ini adalah suatu persoalan yang penting untuk dikaji, oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam pada sebuah permasalahan yang berjudul “pembagian upah Pertanian dengan Sistem *Majek* dalam Tinjauan Hukum Islam” (Studi di Desa Srikaton, Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah).

#### **D. Fokus Penelitian**

Dalam sebuah penelitian *research* yang bertujuan untuk mencari suatu hal yang baru, penelitian akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian pada area yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>10</sup> Adapun fokus penelitian ini adalah terletak pada pembagian upah dengan sistem *majek* dalam tinjauan hukum Islam pada petani dan buruh tani pada tahun 2019-2020 di Desa Srikaton, Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>10</sup> Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2015), h. 95.

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian upah pertanian dengan sistem *majek* di Desa Srikaton, Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pembagian upah pertanian dengan sistem *majek* di Desa Srikaton, Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah?

### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut?

1. Untuk mengetahui praktik pembagian upah pertanian dengan sistem *majek* di Desa Srikaton, Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pembagian upah pertanian dengan sistem *majek* di Desa Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

### G. Signifikasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan penelitian diatas, maka di harapkan penelitian tentang pembagian upah pertanian dengan sistem *majek* di tinjau dari hukum Islam pada buruh tani dan

petani di Desa Srikaton, Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dapat bermanfaat atau berguna baik secara praktis maupun teoritis.

1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai praktik pembagian upah pertanian dengan sistem *majek*.
2. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman terutama hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah.

#### H. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.<sup>11</sup> Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>11</sup> Syahri, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 50.



Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik pembagian upah pertanian dengan sistem *majek* pada petani di Desa Srikaton, Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis, penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah di sebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan mengimplementasikan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini.<sup>12</sup>

Dalam kaitan penelitian ini penulis ingin menggambarkan untuk melakukan analisis dengan apa adanya tentang praktik pembagian upah dengan sistem *majek* pada petani di Desa Srikaton, Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

## 3. Sumber Data

### a) Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain). Dalam penelitian ini data primer di peroleh dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan praktik pembagian upah pertanian dengan sistem *majek* pada petani di Desa Srikaton, Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>12</sup> Moh Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2006), h. 10.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang di peroleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul pokok bahasan dalam kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan di kaji.<sup>13</sup> Sumber data sekunder yang di pakai penulis dalam penelitian ini adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Qur'an, hadist, buku-buku, kitab-kitab fiqh dan literatur-literatur lain yang mendukung.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Adapun yang di wawancarai dalam penelitian ini yaitu pihak yang terkait, dalam hal ini yakni buruh tani dan petani pemilik sawah yang sudah melakukan praktik sistem *majek* di Desa Srikaton, Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini dilakukan

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137.

dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang aktual, menarik dan menimba kepribadian individu.

#### b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, koran, majalah dan sebagainya. Metode ini untuk menghimpun serta memperoleh data dengan cara melakukan pencatatan dengan baik berupa arsip-arsip atau dokumen maupun keterangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun data yang dimaksud disini adalah suatu data yang berkaitan dengan data lapangan.

#### 5. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari satuan atau individu yang karakteristiknya akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh petani dan buruh tani yang ada di Desa Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebanyak 150 orang. Terdiri dari petani 120 dan 30 orang buruh tani.

Sampel adalah bagian suatu atau objek yang mewakili populasi. Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana.

Menurut Suharmi Arikunto berpendapat bahwa untuk sekedar ancerc-ancer maka apabila subjek kurang dari seratus lebih baik diambil semua sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Jadi sampel

dari penelitian ini adalah  $10\% \times 150 = 15$  Orang yaitu 11 petani dan 4 buruh tani.

## 6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data maupun angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu metode pengolahan data yang dilakukan setelah data yang di lakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### a) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis atau meragukan.<sup>14</sup> Dalam proses *editing* di lakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai dengan masalah yang dikaji.

### b) Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Sistemasi data yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan urusan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah di edit di beri tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 103.

## 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Karena data yang di peroleh dari literatur yang ada di lapangan, kemudian di tarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis yang di gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya umum atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari peristiwa tersebut di tarik generalisasi yang bersifat khusus.<sup>15</sup> Metode ini di gunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan praktik upah dengan sistem *majek*.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 182



## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Akad

#### 1. Pengertian Akad

Kata akad adalah kata yang berasal dari bahasa arab *al-aqd* yang dapat diartikan sebagai ikatan, kerjasama, perjanjian. Dalam ilmu hukum Islam, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang didukung oleh syara' yang dapat menyebabkan hukum kepada objeknya.

Yang dimaksud dengan *ijab* dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*.<sup>1</sup>

Istilah yang terdapat dalam bahasa arab mengenai hukum perjanjian atau kontrak ada dua, yaitu kata akad (*al-aqadu*) dan kata *ahd* (*al-ahdu*), Al-Qur'an memakai kata yang pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.<sup>2</sup>

Istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan, sedangkan kata *al-ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan

---

<sup>1</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed. 1, Cet. ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 76.

<sup>2</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 5.

kemauan pihak lain, sehingga hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 76:<sup>3</sup>

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya:“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang lebih tepat adalah akad diterjemahkan dengan perjanjian, meski dikatakan sebagai perikatan, namun perikatan ini adalah perikatan yang lahir dari perjanjian, sedangkan *al-ahdu* justru lebih tepat diterjemahkan sebagai pernyataan atau tekad seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga hanya berjanji untuk diri sendiri dan bukan berjanji untuk orang lain sebagaimana yang sering disebut perjanjian sepihak (perjanjian beban sepihak).<sup>4</sup>

Kontrak pada umumnya, janji-janji para pihak saling berlawanan, seperti contoh dalam perjanjian jual beli dimana salah satu pihak menginginkan barang sedangkan pihak lain menginginkan uang, karena

<sup>3</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012), h. 248.

<sup>4</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 6.

jual beli tidak akan terjadi jika kedua belah pihak menginginkan hal yang sama.<sup>5</sup>

Secara Etimologi, akad merupakan ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Pengertian akad dalam arti khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>6</sup>

Di dalam Al-Quran, hukum yang mendasari dilakukannya *akad* adalah didalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (QS. Al-Maidah:1)<sup>7</sup>

Melihat dari ayat di atas, dapat di simpulkan bahwasannya melakukan perjanjian (akad) dalam transaksi jual beli hukumnya adalah wajib.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>6</sup> Rachmat Syafei'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Angkasa Setia, 2004), h. 44.

<sup>7</sup> Departement agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), h. 141.

## 2. Rukun Dan Syarat Akad

### a. Rukun Akad

Rukun yang terdapat di dalam akad dapat di golongan sebagai berikut:

- 1) *Aqid* yaitu seseorang yang melakukan akad atau subjek akad.

Rukun pertama dalam akad adalah orang yang berakad, atau sebagai subjek hukum. subjek hukum disini ialah manusia dan badan hukum. Dalam *fiqh*, subjek akad perorangan tidak semua orang dipandang cakap mengadakan akad. Berkaitan dengan kecakapan orang melakukan akad ini, para *fuqaha* membahasnya ada tiga hal pokok yaitu *Ahliyah* (kecakapan hukum), yaitu kepantasan seseorang untuk berhubungan dengan akad. *Al-wilayah* (hak atau kewenangan), yakni kewenangan seseorang untuk melakukan akad terhadap suatu objek tertentu. *Iradh* yakni adanya kehendak mengadakan akad yang harus ada pada waktu mengadakan akad.<sup>8</sup>

- 2) *Maqud Alaih* yaitu objek yang akan dijadikan akad.

Untuk menjadi sahnya jual beli harus adanya *ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya jual beli tersebut. Objek akad hanya benda-benda yang halal dan bersih dari najis dan maksiat. Syarat objek ialah:

---

<sup>8</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), h. 51.

a) Telah ada pada waktu diadakan

Objek akad harus ada wujud nya ketika diadakannya akad. Barang yang belum berwujud atau tidak ada wujudnya tidak bisa dijadikan objek akad. Namun para fuqaha memberikan pengecualian, yaitu seperti pada akad *salam* (pesanan), *ijarah* (sewa-menyewa), *mudharabah* (bagi hasil), dimana objeknya cukup diperkirakan berwujud dimasa yang akan datang. Pengecualian tersebut didasarkan prinsip *istihsan* untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan manusia dan tidak bertentangan dengan *syara'*.<sup>9</sup>

b) Dibenarkan oleh *syara'*

Benda-benda yang dijadikan objek harus bermanfaat bagi manusia. Jika objeknya bertentangan dengan syariah maka batal akadnya.<sup>10</sup>

c) Dapat diketahui dan ditentukan oleh para pihak

Objeknya harus dapat diketahui dan ditentukan para pihak yang berakad. Ketidak jelasan objek akan menimbulkan sengketa.

d) Dapat diserahkan

Objek harus dapat diserahkan, baik pada waktu akad maupun belakangan sesuai kesepakatan, namun objek harus benar-benar ada secara sempurna atau tewujud.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 35-36.

<sup>10</sup> *Ibid.*,



e) Milik sendiri, tidak sah menjual barang oranglain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

3) *Maudhu Al-Aqid* yaitu tujuan dari maksud dilakukannya akad.

Tujuan akad dipandang sah dan mempunyai tujuan hukum, yaitu:

a) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad diadakan.

b) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.

c) Tujuan harus dibenarkan oleh syara'.<sup>12</sup>

4) *Sighat Al-Aqid* yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>13</sup>

Dalam proses *ijab* dan *qabul*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi menurut ulama fiqh yaitu sebagai berikut:

a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: "aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian".

b) Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*

c) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 37.

<sup>12</sup> Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), h. 132.

<sup>13</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), h. 51.

- d) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* (jual beli) harus saling merelakan.

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu :<sup>14</sup>

- 1) Dengan cara tulisan atau *kitabah*, misalnya dua *aqid* berjauhan tempatnya maka *ijab qabul* boleh dengan *kitabah* atau tulisan.
- 2) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau *ijab qabul* tidak dapat di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- 3) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad ida (titipan).

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 52

## b. Syarat-Syarat Akad

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang di tentukan syara' yang wajib di sempurnakan, syarat- syarat terjadinya akad ada dua macam:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi di pernikahan.<sup>15</sup>

- 1) Ijab dan *qabul* harus jelas dan bisa dipahami. Yakni, sighat harus meunjukkan keinginan niat dan maksud pelaku untuk bertransaksi.
- 2) Ada kesesuaian antara ijab dan *qabul*. Yakni, ijab dan *qabul* harus bersesuaian dimana suatu pihak melakukan ijab atas objek akad tertentu maka qabul juga harus melakukan objek qabul tertentu.
- 3) Ijab dan *qabul* harus dilakukan berturut-turut. Yakni, ijab dan *qabul* harus dilakukan satu waktu dan salah satu pihak melakukan sesuatu yang menunjukkan keridak setujuannya terhadap isi ijab.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 49.

<sup>16</sup> Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 28-30.

a) Pembatalan Ijab

Ijab dianggap batal dalam hal-hal berikut:

- (1) Pengucapan ijab menarik pernyataannya sebelum *qabul*.
- (2) Adanya penolakan dari salah satu yang akad.
- (3) Berakhirnya tempat akad, yakni kedua pihak yang akad terpisah.
- (4) Pengucapan ijab tidak menguasai lagi hidupnya, seperti meninggal, gila, dan lain-lainnya sebelum adanya *qabul*.
- (5) Rusaknya sesuatu yang sedang dijadikan akad, seperti butanya hewan yang akan dijual atau terkelupasnya kulit anggur dan lain-lain.<sup>17</sup>

Syarat-syarat yang terdapat didalam akad adalah:<sup>18</sup>

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (اهل). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengamampuan, dan karena boros.
2. Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya,
3. Akad itu di izinkan oleh syara', di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang,

<sup>17</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. . . , h. 53.

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 55.

4. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
5. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi *qabul*. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum *qabul* maka batallah ijabnya,
6. Ijab dan *qabul* harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka ijab tersebut menjadi batal.

### 3. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari ke absahannya menurut syara', akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :<sup>19</sup>

#### a. Akad *Shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Hanafiyah membagi akad *shahih* menjadi dua macam , yaitu:

- 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di langungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

<sup>19</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h. 55.



2) Akad *mauquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilaksanakan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

b. Akad Tidak *Shahih*

Akad yang tidak *shahih* adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad yang *bathil* atau *fasid* termasuk golongan ini, sedangkan Hanafiyah membedakan antara yang *fasid* dan *bathil*.

Akad yang tidak *shahih* dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1) Akad *Bathil*

Akad *bathil* adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang di akadkan, seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad, seperti gila, dan lain-lain.

2) Akad *Fasid*

Akad *fasid* adalah akad yang memenuhi persyaratan dan rukun, tetapi di larang syara', seperti menjual barang yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan percekocokan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 63.

#### 4. Prinsip-Prinsip Akad

Dalam hukum Islam, Islam telah menerapkan beberapa prinsip-prinsip akad yang akan berpengaruh pada proses pelaksanaan akad. Prinsip-prinsip akad menurut hukum Islam adalah:<sup>21</sup>

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).

#### 5. Sah Dan Batalnya Akad

Akad di katakan sah dalam hukum Islam apabila akad telah memenuhi syarat dan rukun akad serta memenuhi beberapa kualifikasi sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Bebas dari *gharar*
- b. Bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan
- c. Bebas dari syarat-syarat *fasid*
- d. Bebas dari riba untuk akad atas beban

Akad dikatakan batal apabila akad tidak memenuhi rukun dan syarat akad yang telah di jelaskan diatas.

---

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 1982), h. 65.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 66.

## 6. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
  - 1) Jual beli yang di lakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
  - 2) Berlakunya *khiyarsyarat*, *aib*, atau *rukyyat*,
  - 3) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
  - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

Secara umum akad berakhir dengan terpenuhi maksud dan tujuan dari akad tersebut, namun akad dapat berakhir karena beberapa alasan, yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Difasakkan karena faktor yang tidak di benarkan syara' (rusak)
- 2) Adanya *khiyar* (hak memilih)

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 55.

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 80.

- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan akad karena menyesal (*iqolah*)
- 4) Pihak yang berakad tidak memenuhi kewajiban
- 5) Karena habisnya waktu.

## 7. Hikmah-Hikmah dalam Berakad

Hikmah yang terdapat dalam berakad adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat melakukan hal yang semena-mena dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.<sup>25</sup>

## B. *Ijarah*

### 1. Pengertian *Ijarah*

Menurut etimologi *ijarah* adalah nama untuk *ujroh* yang mengikuti wazan *fa'alah* adalah *baiul manfa'ati* (menjual manfaat). Adapun menurut termonologi *syara'* banyak sekali pengertian *ijarah* sesuai dengan pendapat para ulama fiqih. Pengertian-pengertian itu maknanya mendekati kesamaan hanya berbeda dalam penggunaan kata. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan dikemukakan beberapa definisi *ijarah* menurut beberapa pendapat ulama fiqih, antara lain:<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 128.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 113.

- a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *ijarah* ialah:<sup>27</sup>

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”

- b. Ulama Asy-Syafi’iyah berpendapat bahwa *ijarah* ialah:<sup>28</sup>

عَقْدٌ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ مَقْصُودَةٌ مَعْلُومَةٌ مُبَا حَةً قَا بِلَةً لِلْبَدَلِ  
وَالْإِ بَا حَةً بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti tertentu”.

- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *Ijarah* ialah:<sup>29</sup>

تَمْلِيْكُ مَنْأَفِ شَيْءٍ مُبَا حَةً مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya: “Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”

- d. Menurut Hasbi Ash-Shiddiq, *ijarah* ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.<sup>30</sup>

Dalam Fiqih Sunah, Sayyid Sabiq mengatakan *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti). Menurut pengertian syara’ *ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa

<sup>27</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121.

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : AMZAH, 2015), h. 316.

<sup>29</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122.

<sup>30</sup> Helmi Basri dan Masrun, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2011), h. 21.



yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.<sup>31</sup>

Ulama hanafiyah berpendapat *Ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *Ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>32</sup>

Pada dasarnya *Ijarah* adalah salah satu bentuk kegiatan antara para pihak yang melakukan akad guna meringankan pekerjaan salah satu pihak, serta merupakan bentuk kegiatan social yang saling tolong menolong antara sesama sesuai ajaran agama.<sup>33</sup> Dan tujuannya disyariatkannya *Ijarah* yaitu untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang namun tidak dapat bekerja, dan di pihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang dengan adanya *Ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan.<sup>34</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa *Ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan

---

<sup>31</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 228.

<sup>32</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 121.

<sup>33</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 30.

<sup>34</sup> Amin Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 217.

jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

### a. Qs. Al-Baqarah ayat 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ  
مَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah: 233)<sup>35</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah di sepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian di serahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh di lakukan. Tetapi kalian harus member upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah di berikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah, harrus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang di rugikan.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Peafsir Al-Qur'an 1971), h. 388.

<sup>36</sup> Al-Iman Jalaluddin Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman, *Tafsir Jalalain*, Cet. Ke-2, (Surabaya: PT. Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015), h. 169.

b. Qs. Al-Qashash ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَتَّابِتِ اسْتَعْرِجُهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ  
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ  
أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syuaib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".<sup>37</sup>

c. Hadist Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجِمَ وَاعْطِيَ الْحِجَامَ أَجْرَهُ  
(رواه البخاري مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda,  
“berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu  
upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari)<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penafsir Al-Qur'an 1971), h. 564.

<sup>38</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan Mutiara Hadits Shahih Bukhari Dan Muslim*, (Jakarta: Gramedia, 2017), h. 105.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW tersebut jelaslah bahwa kegiatan upah-mengupah hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

Disamping Al-Qur'an dan sunnah, dasar hukum upah adalah *ijma'*.<sup>39</sup> Sejak zaman sahabat sampai sekarang upah telah disepakati oleh para ahli hukum Islam.

### 3. Rukun Dan Syarat *Ijarah*

#### a. Rukun *Ijarah*

Rukun *Ijarah* menurut Hanfiyyah ada 4 yaitu sebagai berikut:

- 1) *Aqid* (Orang yang berakad) Orang yang melakukan akad *Ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Mustajir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
- 2) *Sighat* yaitu *ijab* dan *qobul* antara *mu'jir* dan *mustajir*, *ijab qobul* upah mengupah.<sup>40</sup> Yang dimaksud dengan *shighat* transaksi *Ijarah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya.

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. ke-3, (Jakarta: AMZAH, 2015), h. 320.

<sup>40</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et. al. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), h. 317.

- 3) *Ujrah* (upah), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dalam upah-mengupah. Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan.
- 4) Manfaat, Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *Ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *Ijarah* yang terdiri dari:

- 1) *Sigah Ijarah* yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa atau jasa dan penyewa atau pengguna jasa.
- 3) Objek akad *Ijarah*, yaitu:
  - a) Manfaat barang dan sewa.
  - b) Manfaat jasa dan upah.<sup>41</sup>

#### **b. Syarat *Ijarah***

Syarat *Ijarah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat *sah*, dan syarat *lazim*.

---

<sup>41</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 105.

#### 1) Syarat terjadinya Akad

Syarat *in'inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid*, zat akad, dan tempat akad.

Sebagaimana telah di jelaskan dalam jual-beli, menurut ulama hanafiyah, '*aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi,jika bukan barang miliknya sendiri, akad *Ijarahmumayyiz*, di pandang sah bila telah diizinkan walinya.

#### 2) Syarat Pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar *Ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian *Ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan *Ijarah*.

#### 3) Syarat Sah *Ijarah*

Keabsaan *Ijarah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*).

#### 4) Syarat Barang Sewaan

Diantara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Hal itu didasarkan pada hadist Rasulullah SAW, yang



melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang dan dikuasai, sebagaimana dalam jual-beli.

5) Syarat *Ujrah* (Upah)

Para ulama menetapkan syarat upah, yaitu:

- a) Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- b) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk di tempati dengan menempati rumah tersebut.

6) Syarat yang Kembali pada Rukun Akad

Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad, seperti menyewakan rumah tersebut akan ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa.

7) Syarat Kelaziman

Syarat kelaziman *Ijarah* terdiri atas dua hal berikut:

- a) *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat Jika terdapat cacat pada *ma'qud' alaih*, penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.
- b) Tidak ada *uzur* yang dapat membatalkan akad<sup>42</sup>

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *Ijarah* adalah :

<sup>42</sup>Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 126-129.

1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah *baligh* dan berakal (*Mazhab* Syafi'i Dan Hambali).

Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *Ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan *Mazhab* Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia *baligh*, tetapi anak yang telah *mumayiz* pun boleh melakukan akad *Ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.

3) Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.

4) Objek *Ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh

menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

5) Objek *Ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.

Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadah.<sup>43</sup>

#### 4. **Macam-Macam *Ijarah***

*Ijarah* terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *Ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. *Al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

---

<sup>43</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227.

- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah . Dalam *Ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.<sup>44</sup>

*Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *Ijarah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.

## 5. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

*Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *Ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa;
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya;

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 231.

3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan;
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah di tentukan dan selesainya pekerjaan;
5. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *Ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.<sup>45</sup>

Berakhirnya akad ijarah yaitu :

1. Menurut ulama Hanafiyah, *Ijarah* dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang berakad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskanya. Adapun menurut Jumhur ulama, *Ijarah* itu tidak batal, tetapi diwariskan.
2. Pembatalan akad.
3. Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *Ijarah*, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.
4. Habisnya waktu, kecuali ada *uzur*.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 122.

<sup>46</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 137.

## C. Upah

### 1. Pengertian Upah

Menurut bahasa upah berarti imbalan atau pengganti, hampir serupa dengan sewa istilah yang di gunakan dalam bahasa Arab yaitu sama-sama menggunakan istilah *Ijarah*. Menurut istilah upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.<sup>47</sup>

Upah dalam Islam dikenal dalam istilah *Ijarah*, secara terminology kata *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al- 'iwad* yang dalam bahasa indonsia berarti ganti atau upah.<sup>48</sup>

Upah secara umum adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Dalam kamus besar Indonesia pengertian upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.<sup>49</sup>

Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau

<sup>47</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 182.

<sup>48</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 15.

<sup>49</sup>W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 1345.



perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukannya.<sup>50</sup>

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian.<sup>51</sup>

## 2. Rukun Dan Syarat Upah

### a. Rukun Upah

Menurut Hanafiah rukun-rukun upah hanya satu, yaitu *ijab* dan *qobul*, yakni pernyataan dari orang yang mengupah dan menerima upah. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun upah itu ada empat, yaitu:<sup>52</sup>

- 1) *Aqid* yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah, *mu'jir* adalah orang yang memberikan upah, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Jadi jika seseorang akan melakukan akad upah-mengupah maka harus ada *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu.

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (30)

<sup>51</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung : Permatanet Publishing, 2016), h. 141.

<sup>52</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 117.

- 2) *Sighat* yaitu *ijab* dan *qobul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *ijab qobul* upah mengupah.<sup>53</sup> Yang dimaksud dengan *shighah* transaksi *ijarah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya.
- 3) *Ujrah* (upah), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dalam upah-mengupah. Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang didapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijarah*. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang dihitung.<sup>54</sup> Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli di bidangnya.
- 4) Manfaat, yaitu Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat:

---

<sup>53</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et. al. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), h. 317.

<sup>54</sup> *Ibid.*, h.319

- a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. Jadi maksudnya barang yang akan menjadi objek akad tersebut haruslah bermanfaat bagi penyewa. Contohnya rumah atau sepeda.
- b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa). Maksudnya seseorang yang melakukan sewa-menyewa dan upah mengupah harus menyerahkan objek sewa-menyewa dan memberitahu kegunaan benda tersebut. Jika si pekerja tidak paham atas manfaat dari benda tersebut.

#### **b. Syarat-Syarat Upah**

Adapun syarat-syarat upah, Taqyuddin an-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:<sup>55</sup>

- 1) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- 2) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, h.105.

- 3) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
- 4) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antar kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan.
- 5) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- 6) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.

Berdasarkan syarat-syarat upah tersebut maka suatu pengusaha yang mempekerjakan buruh haruslah memenuhi syarat-

syarat tersebut agar tidak timbul suatu permasalahan atau kesalahpahaman antara buruh dengan pengusaha tersebut.

### 3. Macam-Macam Upah

Didalam fiqh muamalah upah dapat di klasifikasikan menjadi dua macam antara lain :

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajru misli*) adalah Upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.<sup>56</sup>

### 4. Waktu Pembayaran Upah

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah di sepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.<sup>57</sup>

Islam menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan *dhalim* dan orang yang tidak membayar upah kepada para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi Allah Swt dan Rasulullah Saw

<sup>56</sup> M.I Yusanto dan MK.Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 67.

<sup>57</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung : Permatanet Publishing, 2016), h. 143.

pada hari kiamat, karena dalam hal ini Islam sangat menghargai waktu dan tenaga seorang pekerja atau karyawan. Seperti dalam hadits berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering” (HR. Ibnu Majah)<sup>58</sup>

Dalil tersebut di atas menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Islam agar bergegas atau menyegerakan dalam memberikan upah setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, jangan sampai menunda pembayaran upah yang menjadi hak buruh apabila kita ingin selamat dari murka Allah SWT.

Para ulama berpendapat, berdasarkan maksud hadits tersebut, upahnya adalah hasil kerja badannya dan mempercepat manfaatnya. Apabila dia mempercepat pekerjaannya maka harus dipercepat pula upahnya. Dalam istilah jual beli, jika barang sudah diserahkan uang harus segera diberikan. Pekerja lebih berhak daripada pedagang karena bagi pekerja itu harga tenaganya, sedangkan bagi pedagang harga barangnya. Oleh karena itu, haram menunda pembayaran sedangkan majikan sanggup melunasinya pada saat itu.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz II, No.2443 (Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 2009), h. 816.

<sup>59</sup> Yusuf Qardhawi, penerjemah Zaenal Arifin, *Norma dan Etika Ekomoni Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 232.



## 5. Bentuk Upah

Sesuai dengan pengertiannya bahwa upah bisa berbentuk uang yang dibagi menurut ketentuan yang seimbang, tetapi upah dapat berbentuk selain itu. Adapun upah dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu upah dalam bentuk uang dan upah dalam bentuk barang.<sup>60</sup> Maksudnya upah yang diberikan itu harus bernilai yang dapat diperjual belikan. Jika upah yang didapat berbentuk barang maka barang tersebut bisa dijual oleh buruh. Barang tersebut harus jelas kepemilikannya dan tidak ada cacat.

Taqiyyudin an-Nabhani mengatakan bahwa upah dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Upah (*ajrun*) *musamma* yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak ada unsur paksaan.
- b. Upah (*ajrun*) *misl'* yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.<sup>61</sup>

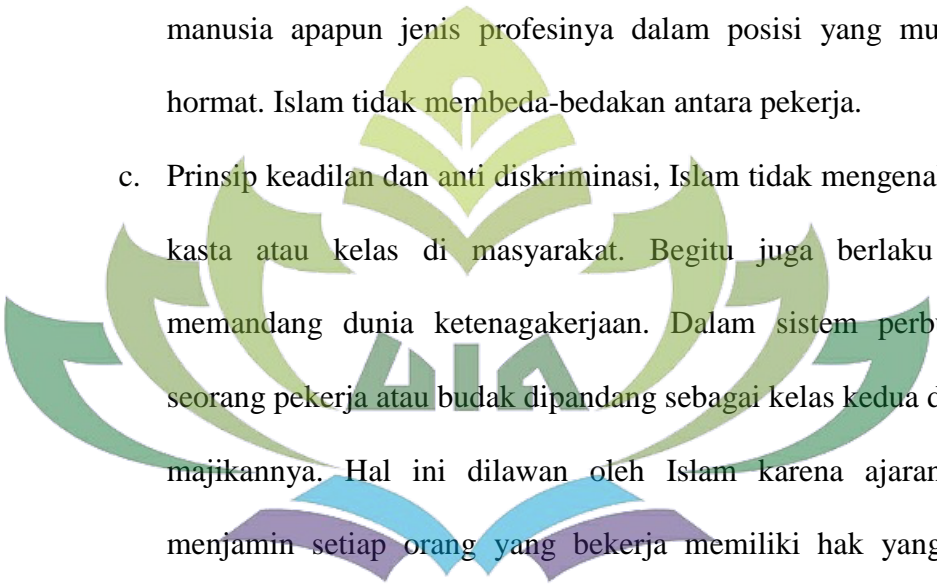
## 6. Prinsip-Prinsip Upah dalam Islam

Islam telah banyak menyebutkan prinsip-prinsip dasar upah sebagai hak pekerja, baik itu disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Prinsip-prinsip dasar upah antara lain:

---

<sup>60</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), h. 103.

<sup>61</sup> *Ibid.*, h.104.

- 
- a. Prinsip kemerdekaan manusia, Islam datang dengan tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentolerir sistem perbudakan dengan alasan apapun terlebih lagi dengan adanya praktik jual beli pekerja dengan mengabaikan hak-hak pekerja yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan.
  - b. Prinsip kemuliaan derajat manusia, Islam menempatkan setiap manusia apapun jenis profesinya dalam posisi yang mulia dan hormat. Islam tidak membedakan antara pekerja.
  - c. Prinsip keadilan dan anti diskriminasi, Islam tidak mengenal sistem kasta atau kelas di masyarakat. Begitu juga berlaku dalam memandang dunia ketenagakerjaan. Dalam sistem perbudakan, seorang pekerja atau budak dipandang sebagai kelas kedua dibawah majikannya. Hal ini dilawan oleh Islam karena ajaran Islam menjamin setiap orang yang bekerja memiliki hak yang setara dengan orang lain termasuk atasan atau pimpinan.
  - d. Prinsip kelayakan upah pekerja, upah adalah pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang memperkerjakan. Islam sangat memperhatikan masalah upah pekerja sebagai hak dan gaji atas pekerjaan yang mereka kerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja, maka islam memberikan pedoman kepada para pihak

yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencangkup dua hal yaitu adil dan layak.<sup>62</sup>

## 7. Gugurnya Upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang di tangannya rusak. Menurut ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada di tangannya, ia tidak mendapat upah. Pendapat tersebut *senada* dengan pendapat ulama hanabilah. Ulama Hanafiyah juga hampir *senada* dengan pendapat ulama Hanabilah.

Ulama Hanafiyah juga hampir *senada* dengan pendapat di atas. Hanya saja di uraikan sebagai berikut:

- a. Jika benda ada di tangan *ajir*
  1. Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
  2. Jika tidak ada bekas pekerjaanya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.
- b. Jika benda berada di tangan penyewa

Pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.<sup>63</sup>

<sup>62</sup>Suhrawardi K, Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 155.

<sup>63</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 133.

## 8. Hikmah Upah Mengupah

Adapun hikmah dari hubungan muamalah dalam bidang upah mengupah selain sebagai bentuk jual beli jasa yang telah Allah halalkan, selain itu di jelaskan di antaranya sebagai berikut.

1. Dapat ikut memenuhi hajat orang banyak dan membuka lapangan pekerjaan.
2. Menumbuhkan sikap saling menolong dan kepedulian terhadap orang lain.
3. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara pengupah dan yang diupah.
4. Dapat saling menguntungkan dengan cara yang baik dan sesuai dengan syariah.<sup>64</sup>

### D. Sistem *Majek*

#### 1. Pengertian Sistem *Majek*

*Majek* adalah istilah dari orang Jawa yang berasal dari kata “ajeg” yang artinya pungutan pada waktu tertentu, istilah *Majek* di gunakan dalam pertanian di Desa Srikaton Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Sistem *majek* yaitu kerjasama sistem upah antara pemilik sawah dan buruh tani. Pemilik sawah memberikan tanggung jawab kepada buruh tani untuk menanam dan memanen padi, dengan upah pada saat panen dan apabila gagal panen buruh tani tidak mendapatkan hasilnya. Kegiatan tersebut adalah kegiatan upah

---

<sup>64</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 187.

mengupah (*Ijarah*) kepada buruh tani, dimana buruh tani yang di tanggung jawabkan untuk menanam padi dan memanen padi akan di bayar saat panen.<sup>65</sup>

Pemberian hasil panen yaitu 5:1, upah menanam dan memanen padi tersebut belum jelas karena apabila mendapatkan hasil panen yang berlimpah maka buruh tani akan mendapatkan hasil yang banyak, apabila hasil panen sedikit maka buruh tani mendapatkan hasil sedikit dan apabila gagal panen maka si buruh tani tidak mendapatkan hasil padi sama sekali.

## 2. Hak dan Kewajiban Sistem *Majek*

- a. Buruh tani berhak mendapatkan imbalan atas jasa yang ia kerjakan setelah panen tiba dan buruh tani juga bertanggung jawab untuk mencabut benih padi serta menanam padi.
- b. Perawatan sawah sampai panen sepenuhnya di bebaskan kepada pemilik sawah.
- c. Gagal panen akan di tanggung kedua belah pihak.

## E. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang sistem pengupahan pada buruh menurut Tinjauan Hukum Islam sudah dikerjakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, seperti:

skripsi dari Siti Nurhanik, yang berjudul Sistem Pengupahan Buruh Tani Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Hukum Islam, yang berisi tentang sistem pengupahan buruh tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kab.Bantul dilakukan dengan cara buruh

<sup>65</sup>Prawanti, Wawancara dengan Penulis, di Srikaton, 28 Juli 2020.

tani melakukan beberapa pekerjaan yakni, pertama, membajak sawah, kedua, mencangkul, menyiram, memupuk, tandur, mat`un, menanam tembakau, ketiga, merajang tembakau dengan sistem borongan. Masalah yang timbul adalah upah yang diberikan untuk buruh tani sangatlah kecil dan jauh dari UMR (Upah Minimum Regional) di daerah Yogyakarta, yakni Rp586.000,- tidak sesuai dengan jerih payah pekerja dan pekerjaan ini memang tidak membutuhkan skill tetapi tidak semua orang mampu mengerjakannya.<sup>66</sup>

Skripsi dari Aminatun, yang berjudul *Derep (Sistem Upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggean Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam*, yang berisi tentang pekerjaan buruh tani di Desa Wundumbolo tidak hanya menggarit padi saja melainkan ada yang bertugas ngedus, yakni memasukan hasil menggarit padi kedalam karung. Upah yang mereka terima bukanlah berupa uang, melainkan gabah. Gabah tersebut di berikan setelah pekerjaan selesai. Gabah yang diberikan cukup pas-pasan bahkan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sistem pengupahan di Desa Wudumbolo yaitu setiap delapan karung hasil panen dibagi delapan dan satu per delapannya untuk buruh. Namun bagi buruh yang bekerja ngedus lebih sedikit upahnya dibandingkan jumlah upah buruh ngarit, sehingga upahnya berbeda.<sup>67</sup>

Skripsi dari Ika Nur Handayani, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon di Desa Gemulung Kelurahan Kwagen*

---

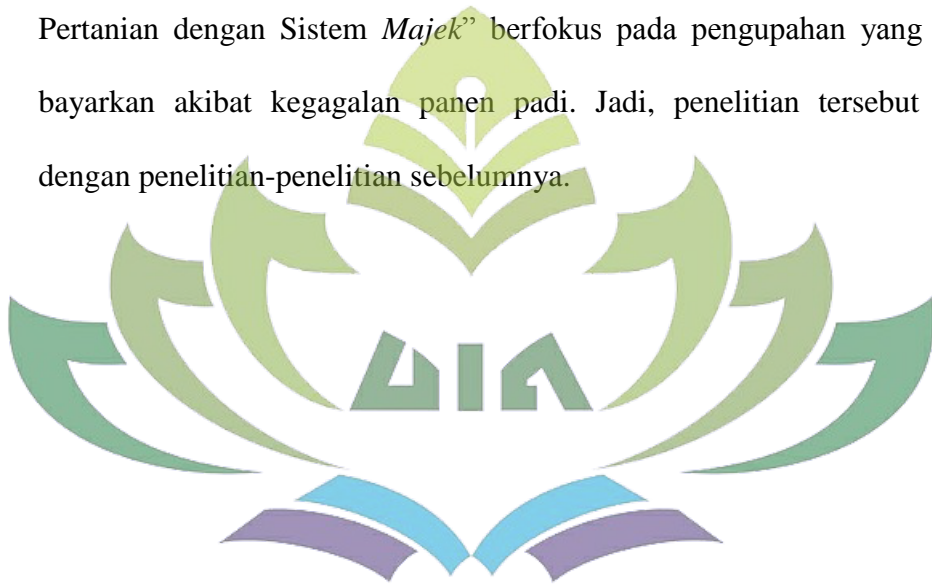
<sup>66</sup> Siti Nurhanik, Skripsi, *Sistem Pengupahan Buruh Tani Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

<sup>67</sup> Aminatun, Skripsi, *Derep (Sistem Upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggean Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Kendari: IAIN Kendari, 2017).



Kecamatan Gemulung Kabupaten Seragen, Yang berisi tentang pekerjaan buruh tani ketika musim panen tiba pemilik sawah meminta kepada buruh tani untuk memanen padi di sawah. Upah yang mereka peroleh bukanlah uang melainkan padi.<sup>68</sup>

Berdasarkan ketiga penelitian diatas, maka dapat di simpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut berfokus pada pengupahan yang tidak di bayarkan dengan uang melainkan barang, sedangkan “Pembagian Upah Pertanian dengan Sistem *Majek*” berfokus pada pengupahan yang tidak di bayarkan akibat kegagalan panen padi. Jadi, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.



---

<sup>68</sup>Ika Nur Handayani, Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon di Desa Gemulung Kelurahan Kwagen Kecamatan Gemulung Kabupaten Seragen*, (Sunan Kalijaga : UIN Sunan Kalijaga, 2015).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed. 1, Cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et. al. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.

Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, Surabaya: Cetril Media, 1992.

Adam, Panji, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Al-Iman Jalaluddin Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman, *Tafsir Jalalain*, Cet. Ke-2, Surabaya: PT. Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015.

Aminatun, Skripsi, *Derep (Sistem Upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggean Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kendari: IAIN Kendari, 2017.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013

Basri, Helmi, Masrun, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2011.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Pres, 1982.

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Djamil, Fathurrahman, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.

- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hendi Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ika Nur Handayani, Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon di Desa Gemulung Kelurahan Kwagen Kecamatan Gemulung Kabupaten Seragen*, Sunan Kalijaga : UIN Sunan Kalijaga, 2015
- Isa Asyur, Ahmad, *Fiqhul Muyassar Fi Al-muamalat*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995
- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung : Permatanet Publishing, 2016
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- M.I Yusanto dan MK.Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, Sleman: Asnalitera, 2013.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Dar Ihya'al-Kutub al-'Arabiyah, 2009
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan Mutiara Hadits Shahih Bukhari Dan Muslim*, Jakarta: Gramedia, 2017.
- Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : AMZAH, 2015.
- Mustafa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2018
- Nurhayati, Sri ,Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-1, Bandung: PT. Alma'arif, 1987.

Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016.

Siddik, Abdullah, *Inti Dasar Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Siti Nurhanik, Skripsi, *Sistem Pengupahan Buruh Tani Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Hukum Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhrawardi K, Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2015.

Syafei'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Angkasa Setia, 2004.

Syahri, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003

Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.

Tika, Moh Pabundu, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Angkasa, 2006

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (30)

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Yusuf Qardhawi, penerjemah Zaenal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press 1997.

## **B. Jurnal**

Suyanto, “Istilah-istilah dalam Budidaya Tanaman Padi di Desa Banjarsari Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”.*Jurnal NUSA*, Vol. 14 No. 1 Februari 2019.

## **C. Sumber Online**

Kamus Pertanian Apa Arti Musim Tanam” (On-line), tersedia di: <https://m-bisnis-com.cdn.ampproject.org/> (06 Agustus 2013).

## **D. Wawancara**

Bapak Anwar, Wawancara dengan Penulis, di rumah Bapak Anwar, Srikaton, 12 Oktober 2020.

Bapak Brahim, Wawancara dengan Penulis, di rumah Bapak Brahim, Srikaton, 12 Oktober 2020.

Bapak Jumadi, Wawancara dengan Penulis, di rumah Bapak Jumadi, Srikaton, 10 Oktober 2020.

Bapak Juman, Wawancara dengan Penulis, di rumah Bapak Juman, Srikaton, 02 Oktober 2020.

Bapak Nurdin, Wawancara dengan Penulis, di rumah Bapak Nurdin, Srikaton, 12 Oktober 2020.

Bapak Rumanto, Wawancara dengan Penulis, di rumah Bapak Rumanto, Srikaton, 02 Oktober 2020.

Bapak Saiman, Wawancara dengan Penulis, di rumah Bapak Saiman, Srikaton 10 Oktober 2020

Bapak Selamat, Wawancara dengan Penulis, di rumah Bapak Selamat, Srikaton, 10 Oktober 2020.

Bapak Sugito, Wawancara dengan Penulis, di rumah Bapak Sugito, Srikaton 12 Oktober 2020.

Bapak Triswanto, Wawancara dengan Penulis, di rumah Bapak Triswanto, Srikaton, 12 Oktober 2020.

Bapak Widodo, Wawancara dengan Penulis, di rumah Bapak Widodo, Srikaton, 02 Oktober 2020.

Maryati, Wawancara dengan Penulis, di rumah Ibu Maryati Srikaton, 15 Oktober 2020.

Prawanti, Wawancara dengan Penulis, di rumah Ibu Prawanti, Srikaton, 13 Oktober 2020.

Riati, Wawancara dengan Penulis, di rumah Ibu Riati, Srikaton, 14 Oktober 2020

Satirah, Wawancara dengan Penulis, di rumah Ibu Satirah, Srikaton 14 Oktober 2020.

